



**RENCANA  
STRATEGIS**

**BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
2020—2024**

---



**RENCANA  
STRATEGIS  
BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
2020—2024**

---



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) berhasil menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024. Renstra BPP Bahasa disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020—2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024. Selain itu, Renstra BPP Bahasa juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun (2015—2019) dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat dan berupaya berinovasi agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020—2024 dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

Renstra BPP Bahasa memuat langkah untuk mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, tujuan dan sasaran strategis, serta kebijakan, program, dan kegiatan selama lima tahun mendatang.

Renstra BPP Bahasa Tahun 2020—2024 menjadi acuan seluruh satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa agar pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia berhasil sesuai dengan yang direncanakan dan dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan.

Jakarta, September 2020

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,



**Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN (INDIKATOR KINERJA TUJUAN) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.....	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	15
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	30
BAB V PENUTUP.....	34
LAMPIRAN.....	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

***“Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean,  
Bahasa Indonesia.”***  
**(Butir Ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)**

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang kesatuan negara-bangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

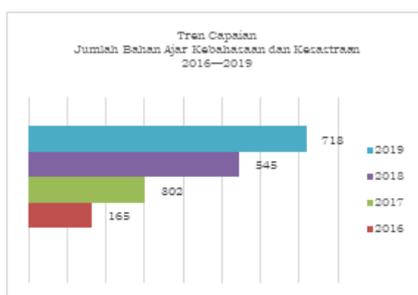
Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui trigatra kebahasaan, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Oleh sebab itu, pembangunan manusia Indonesia harus dilaksanakan dengan melibatkan aspek kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan—termasuk sastra di dalamnya—yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sehubungan dengan itu, pembangunan bidang kebahasaan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra merupakan lembaga strategis dalam pembentukan SDM tersebut. Berikut ini kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan yang ada dalam perencanaan strategis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

### 1.1 Kondisi Umum

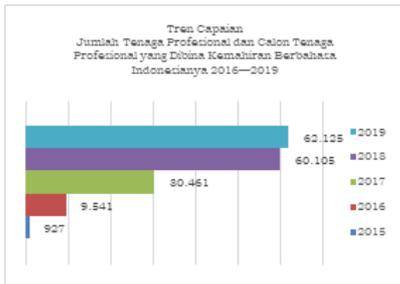
Dalam melaksanakan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan periode 2015—2019, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan enam sasaran program, yakni (1) meningkatnya jumlah judul buku pengayaan literasi baca, (2) meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti pengujian UKBI, (3) meningkatnya bahasa dan sastra berkembang dan terlindungi, (4) meningkatnya pengendalian Bahasa Indonesia di ruang publik, (5) meningkatnya peran bahasa Indonesia melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di tingkat Asean, dan (6) Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan.



Sasaran program pertama, yaitu Meningkatkan Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca, diukur melalui indikator kinerja program (IKP) pertama yaitu Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan. Pencapaian IKP tersebut dilakukan melalui penyediaan buku bacaan literasi. Bahan bacaan tersebut ditujukan untuk satuan

pendidikan SD, SMP, dan SMA. Secara akumulatif capaian IKP Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan adalah sebesar 119,7% atau 718 dari 600 judul buku yang telah ditetapkan.

Selaras dengan hal itu, BPP Bahasa ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator Gerakan Literasi Nasional (GLN) sejak tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2019 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga melaksanakan pencetakan dan pengiriman 2.402.320 eksemplar buku dari 60 judul bahan bacaan literasi ke 2.258.560 sekolah di berbagai jenjang, 658 Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta 40 perpustakaan yang berada di wilayah 3T yang tersebar di 27 provinsi.



Sasaran program kedua, yaitu Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), dicapai melalui IKP kedua yaitu Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya. Secara

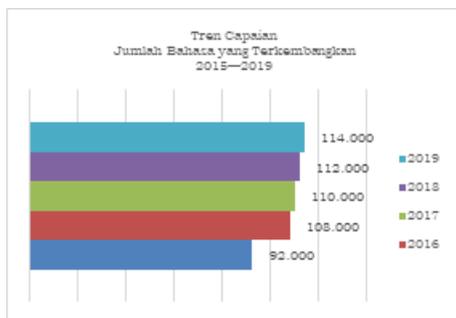
akumulatif capaian IKP Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya adalah sebesar 149,93% atau 62.125 orang dari 41.434 orang.

Meskipun terlihat tidak berimbang antara target dan capaian, pada kenyataannya capaian tersebut lebih banyak diperoleh dari segi kuantitas saja. Perubahan Renstra BPP Bahasa dan Kemendikbud pada pertengahan tahun 2018 ikut serta mengubah target pada indikator ini: yang semula fokus pada pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul menjadi tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang dibina kemahiran berbahasa Indonesiannya. Perlu diketahui, untuk memperoleh pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul sangatlah tidak mudah. Seorang pendidik harus lulus dengan skor 525—674 (predikat unggul) sehingga memerlukan banyak target agar tercapai target yang ditetapkan 1.500 orang per tahunnya.

Berbeda dengan target pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul, untuk membina tenaga profesional dan calon tenaga profesional kemahiran berbahasa Indonesiannya sangatlah mudah. BPP Bahasa hanya membutuhkan sejumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang akan dibina kemahiran berbahasa Indonesiannya. Dengan kata lain, BPP Bahasa hanya membutuhkan kuantitas peserta daripada kualitas peserta yang harus berpredikat mahir.

Upaya sosialisasi yang dilakukan BPP Bahasa berdampak pada meningkatnya minat berbagai lembaga untuk melakukan kemitraan. Beberapa lembaga yang sudah melakukan kemitraan dengan BPP Bahasa antara lain: sekolah, universitas, bank, dan lembaga layanan bahasa. Selain kemitraan dengan Laporan Kinerja 2019 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 35 berbagai lembaga, BPP Bahasa juga melaksanakan penjajakan pendirian tempat uji kemahiran yang dilakukan di luar negeri. Untuk penjajakan pendirian TUK luar negara dilakukan di dua negara, yakni Thailand dan Prancis. Hasil pendirian TUK di luar negeri akan berpengaruh terhadap peningkatan kemahiran berbahasa bagi calon tenaga

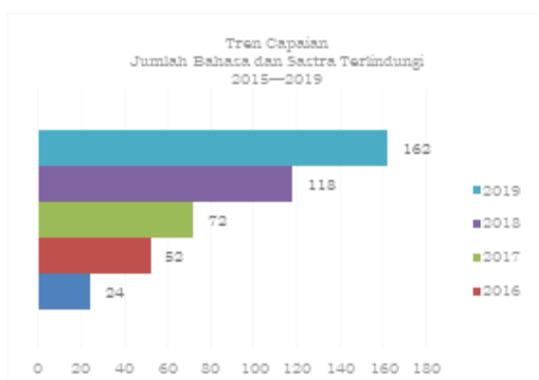
profesional dan tenaga profesional di luar negeri. UKBI bagi warga negara asing khususnya bagi tenaga profesional sangat penting guna menunjang kelancaran pekerjaan mereka dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.



Sasaran program ketiga yaitu, Meningkatnya Bahasa dan Sastra Berkembangkan dan Terlindungi dicapai melalui IKP ketiga yaitu Jumlah Bahasa Berkembangkan, IKP keempat Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi, dan IKP kelima Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. IKP ketiga dicapai dengan melakukan inventarisasi kosakata

dan pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara akumulatif capaiannya mencapai 100%, yakni 114.000 kosakata. Hasil pemerayaan tersebut dikembangkan melalui, antara lain, peluncuran KBBI Daring (rata-rata kunjungan per hari adalah 49.811 kali), KBBI Luring (iOS dan Android), KBBI Braille, dan KBBI Disnetra.

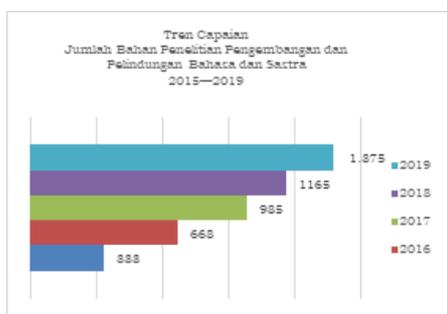
Sementara itu, IKP keempat dicapai melalui lima program unggulan perlindungan bahasa dan sastra, yakni (1) pemetaan, (2) kajian vitalitas, (3) konservasi, (4) revitalisasi, dan (5) registrasi bahasa dan sastra. Hingga tahun 2019 BPP Bahasa telah menginventarisasi dan mendeskripsikan sebanyak 718 bahasa daerah. Dari 718 bahasa yang sudah dipetakan, baru 74 bahasa yang dikaji vitalitasnya. Hal ini berarti bahasa daerah yang terpetakan vitalitas bahasanya baru sekitar 10% dari jumlah bahasa yang sudah terpetakan (berdasarkan kajian vitalitas



bahasa pada 2011—2018). Hasilnya, 11 bahasa dikategorikan punah, 4 bahasa kritis, 19 bahasa terancam punah, 2 bahasa mengalami kemunduran, 19 bahasa dalam kondisi rentan (stabil, tetapi terancam punah), dan 19 bahasa berstatus aman. IKP keempat secara akumulatif capaiannya sebesar 132,78% atau 162 bahasa dan sastra dari 122

bahasa dan sastra. Faktor pendorong ketercapaian target ini antara lain karena: (1) pelaksanaan sosialisasi program perlindungan bahasa dan sastra daerah yang telah dan akan dilakukan oleh BPP Bahasa kepada para pemangku kepentingan di daerah; (2) Selain itu adanya koordinasi dan kolaborasi antara Balai/Kantor Bahasa dan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah (pemprov, pemkab/pemkot), perguruan tinggi, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat; (3)

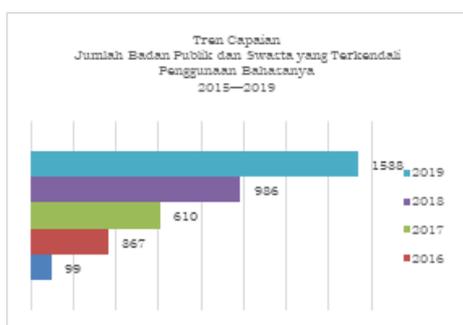
Dibentuknya kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan Balai/Kantor Bahasa dan perwakilan pemerintah daerah (Bappeda Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menangani program perlindungan bahasa dan sastra daerah.



Selanjutnya, IKP Kelima dicapai melalui aktivitas penelitian kebahasaan dan kesastraan. Jumlah penelitian pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra yang dilaksanakan oleh BPP Bahasa berhasil mencapai 79,84% atau 1.375 naskah dari target kinerja yang ditetapkan sejumlah 1.722 naskah. Alasan-alasan ketidaktercapaian target tersebut antara lain:

- kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan;
- konsultasi dengan narasumber kurang maksimal;
- waktu pelaksanaan penelitian yang kurang maksimal;
- waktu pelaksanaan penelitian ada yang tidak sesuai dengan jadwal semula karena adanya blokir anggaran terhadap beberapa tema penelitian; dan
- terjadi perubahan kebijakan.

Target yang tidak tercapai pada renstra 2015—2019 tidak dilanjutkan pada renstra 2020—2024 karena adanya perubahan kebijakan. Pada renstra 2015—2019 target yang dihitung adalah jumlah penelitian sedangkan pada renstra 2020—2024 target yang dihitung adalah jumlah rekomendasi yang berasal dari hasil-hasil penelitian.

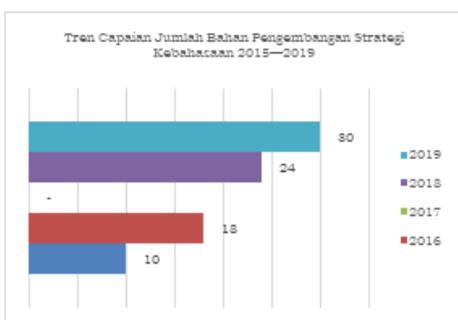


Sasaran Program keempat, yaitu Meningkatkan Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik dicapai melalui upaya peningkatan kualitas penggunaan bahasa di ruang publik pada lembaga di badan publik dan swasta. Badan publik meliputi lembaga pemerintah, sekolah negeri, BUMN, dan BUMD. Lembaga swasta meliputi lembaga berbadan hukum

yang bergerak di bidang pendidikan, penerbitan, penyiaran, dan hukum. Sasaran ini dicapai melalui IKP keenam yaitu Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya yang mencapai 136,1% atau 1.538 lembaga dari target kinerja yang ditetapkan sejumlah 1.130 lembaga. Capaian tersebut

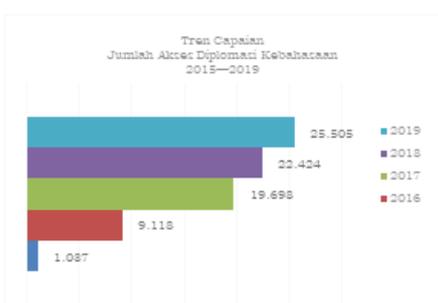
diperoleh melalui gencarnya gerakan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Gerakan itu secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Besarnya atensi badan publik dan swasta yang begitu besar berdampak meningkatnya capaian kinerja pada IKP ini.

Sasaran Program kelima, yaitu Meningkatkan Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN, merupakan implementasi dari amanat penginternasionalan bahasa Indonesia.



Sasaran ini dicapai melalui IKP ketujuh yaitu jumlah bahan pengembangan strategi kebahasaan dan IKP kedelapan yaitu jumlah akses diplomasi kebahasaan. IKP ketujuh diwujudkan dalam bentuk pedoman diplomasi kebahasaan dan kesastraan, kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, jumlah bahan ajar BIPA, dan

jumlah bahan ajar bahasa asing strategis. Secara akumulatif capaian IKP tersebut sebesar 100 % yaitu terealisasi sebanyak 30 bahan.



IKP kedelapan diwujudkan melalui jumlah perseorangan, kelompok, ataupun lembaga yang berpotensi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia di mancanegara. Secara akumulatif capaian IKP tersebut sebesar 154,57% atau dari target yang

ditetapkan sebanyak 16.500 orang terealisasi sebanyak 25.505 orang. Ketercapaian IKP Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut.

- a. Pengiriman tenaga pengajar BIPA atas kerja sama dengan berbagai pihak.
- b. Penyusunan bahan ajar BIPA dan bahan tes BIPA cetak dan daring.
- c. Bimbingan teknis bagi pengajar BIPA.
- d. Bimbingan teknis pengajaran BIPA (TOT) di luar negeri.
- e. Pemaksimalan peran teknologi informasi dalam pengembangan portal aplikasi BIPA Daring.
- f. Program apresiatif bagi penutur asing di luar negeri.
- g. Pengkajian tentang dampak pengiriman baik.

Secara umum target renstra tahun 2015—2019 telah tercapai dengan hasil yang baik. Dari enam sasaran program dengan sembilan indikator kinerja program hampir semua targetnya dapat terealisasi dan melebihi dari target yang ditetapkan kecuali IKP 5. Jumlah Penelitian.

## 1.1 Permasalahan dan Potensi

### A. Permasalahan dan Analisis

Ketercapaian target pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan pada periode 2015—2019 sangat tinggi. Namun, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

Pada Sasaran Program *meningkatkan jumlah judul buku pengayaan literasi baca*, permasalahan utama terletak pada: (1) distribusi buku bacaan literasi belum merata ke seluruh wilayah Indonesia (hanya wilayah 3T); (2) belum meratanya sasaran penerima manfaat buku bacaan literasi<sup>8</sup> (hanya untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SM); (3) belum seluruh judul dapat didistribusikan (hanya 60 dari 718 judul buku); dan (4) belum seluruh judul memenuhi standar penilaian oleh Pusat Perbukuan.

Pada Sasaran Program *meningkatkan jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti pengujian UKBI*, permasalahan terletak pada kurangnya partisipasi tenaga profesional dan calon tenaga profesional dalam mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Hal itu terjadi karena Permendikbud 70 Tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia belum mewajibkan tenaga profesional dan calon tenaga profesional mengikuti tes UKBI. Dalam Permendikbud tersebut belum ada kewajiban bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional dalam mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Selain itu, terbatasnya sarana untuk melakukan pengujian berbasis internet (daring) juga menjadi permasalahan.

Pada Sasaran Program *meningkatkan bahasa dan sastra terkembangkan dan terlindungi*, permasalahan terletak pada kurangnya sumber daya manusia (SDM) bidang pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, misalnya, jumlah leksikograf, pengonservasi, dan perevitalisasi bahasa dan sastra. Hal itu menyebabkan pemutakhiran produk kebahasaan dan kesastraan yang terkembangkan dan terlindungi masih lambat. Masalah lain dalam pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra adalah rendahnya akses masyarakat terhadap produk pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra. Rendahnya akses yang dimaksud adalah terkait dengan indikator terkembangkan dan terlindunginya bahasa dan sastra belum diketahui oleh masyarakat.

Pada Sasaran Program *meningkatnya pengendalian bahasa Indonesia di ruang publik*, permasalahan terletak pada fakta bahwa pengutamakan bahasa negara di ruang publik belum menjadi perhatian semua kalangan, baik pemerintah (pusat-daerah) maupun swasta. Hal itu terlihat dari, antara lain, maraknya penggunaan bahasa asing sebagai nama perumahan, nama gedung, tempat usaha, dan iklan. Selain itu, dalam Peta Keterkendalian Wilayah yang dimiliki oleh Badan Bahasa, baru terdapat 16% wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik (berkategori 42 A dan 40 B). Tingginya penggunaan bahasa asing di ruang publik karena anggapan bahwa bahasa asing (terutama bahasa Inggris) lebih menjual dan bernilai ekonomis. Rendahnya rasa percaya diri untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik inilah yang harus menjadi perhatian.

Pada Sasaran Program *meningkatnya peran bahasa Indonesia melalui pengembangan sastra dan diplomasi kebahasaan di tingkat ASEAN*, permasalahan terletak pada luasnya kawasan sasaran sebagai populasi kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mumpuni dan berpengalaman dalam penyusunan bahan diplomasi bahasa Indonesia untuk penutur asing. Selain itu, peran pemangku kepentingan lain seperti Kementerian Luar Negeri belum maksimal mendukung peningkatan peran bahasa Indonesia dalam kancah internasional.

## **B. Potensi**

Agar pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan berdampak luas bagi masyarakat, perlu dioptimalkan potensi-potensi berikut ini.

### **1. Potensi jumlah penutur bahasa Indonesia**

Hampir semua penduduk Indonesia adalah penutur bahasa Indonesia. Artinya, potensi penutur bahasa Indonesia mencapai ratusan juta jiwa. Bagi sebagian penduduk Indonesia, terutama penutur muda, bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama. Sebagian lain menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Bahasa Indonesia juga dituturkan di luar negeri, terutama pada komunitas tertentu yang di dalamnya terdapat warga negara Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia diajarkan di 52 negara.

### **2. Potensi Bahasa Daerah di Indonesia**

Jumlah bahasa daerah di Indonesia mencapai 846. Jumlah tersebut sangat potensial untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan daerah.

### 3. Potensi Pegiat Literasi

Jumlah komunitas literasi menurut *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi* yang diterbitkan kemdikbud terdapat sekitar 6.340 komunitas literasi yang tersebar di seluruh Indonesia (data per Agustus 2018). Melihat jumlah komunitas literasi yang cukup banyak, sangat dimungkinkan pegiat literasi di seluruh Indonesia juga banyak. Melihat potensi besar ini, BPP Bahasa perlu melakukan upaya meningkatkan dan mendorong komunitas serta pegiat literasi agar tingkat literasi masyarakat Indonesia meningkat.

### 4. Potensi UKBI

UKBI adalah instrumen tes utama kemahiran berbahasa Indonesia di dalam negeri dan luar negeri. UKBI telah dikembangkan seturut ilmu, pengetahuan, dan teknologi, baik dalam desain, materi, proses, maupun teknologi layanan pengujiannya. Teknologi layanan yang mutakhir adalah UKBI *multistage adaptive testing*. Menurut data BPS, terdapat 137.910.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia pada Januari 2020. BPP Bahasa baru melaksanakan 45,05% dari total tenaga profesional dan non tenaga profesional yang mengikuti tes UKBI.

### 5. Potensi Pembina Bahasa

Jumlah pembina bahasa Indonesia yang meliputi penyuluh, widyaiswara, guru, dan dosen bahasa Indonesia belum terdata dan terbina untuk menjadi bagian ekosistem dalam upaya meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan karena BPP Bahasa tidak mungkin melakukan pembinaan bahasa Indonesia.

### 6. Potensi Kelembagaan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki 30 UPT yang dapat secara vertikal dan horozontal untuk melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa.

### 7. Potensi Penerjemahan

Hakikat penerjemahan ialah meyajikan ilmu pengetahuan dari bahasa tertentu agar dapat dimanfaatkan oleh penutur bahasa lain. Dalam konteks ini, potensi naskah dan buku yang dapat diterjemahkan sangat besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia. BPP Bahasa telah melakukan terjemahan sebanyak 113 naskah yang berupa 103 naskah bahan bacaan literasi, 3 buku pendidikan, 6 naskah sastra, dan 1 terjemahan PUEBI.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN (INDIKATOR KINERJA TUJUAN)**

#### **BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

##### **A. Visi**

Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden, yaitu

***Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.***

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa.*

##### **B. Misi**

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut.

**Terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif, budaya literasi masyarakat yang tinggi, penguatan praktik diplomasi kebahasaan yang maju, dan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berdasarkan politik dan perencanaan bahasa baru.**

##### **Indikator keberhasilan:**

- 1) Terciptanya ekosistem riset dan rekayasa kebahasaan dasar dan terapan yang kondusif untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat dijadikan rujukan dalam teori dan praktek kebahasaan.
- 2) Terciptanya budaya literasi masyarakat yang maju dengan kompetensi yang tinggi sejalan dengan perkembangan teknologi digital.
- 3) Menguatnya kerja sama institutional dan profesional para pemangku kepentingan pengembangan dan pembinaan bahasa dalam konteks

pemanfaatan kepakaran kebahasaan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat.

- 4) Menguatnya peran bahasa Indonesia dalam praktik diplomasi kebahasaan di luar negeri.
- 5) Terpeliharanya praktik-praktik bahasa dan sastra daerah yang dinamis oleh komunitas penutur bahasa sebagai wujud perlindungan kearifan lokal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPP Bahasa akan berupaya untuk menyusun beberapa langkah awal sebagai acuan melaksanakan program dan kegiatan selama periode 2020—2024 yang terangkum dalam beberapa produk acuan sebagai berikut.

1. Tersusunnya dokumen *Politik dan Perencanaan Bahasa* baru sebagai pedoman pengembangan dan pembinaan bahasa menuju Indonesia maju.
2. Dihasilkannya dokumen tentang peta jalan baru riset kebahasaan dan kebijakan pendidikan literasi sebagai landasan untuk penyelenggaraan riset kebahasaan dan praktik pendidikan literasi di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
3. Tersusunnya bahan ajar literasi dan model-model pembelajarannya yang dapat digunakan oleh masyarakat yang didukung teknologi digital inovatif.
4. Terbentuknya dan beroperasinya forum mitra literasi sebagai wadah pembinaan penggerak literasi di masyarakat untuk mengembangkan pendidikan literasi yang didukung oleh teknologi digital.
5. Terbentuknya dan beroperasinya forum komunikasi penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) di dalam negeri dan tersedianya pusat-pusat pembelajaran BIPA di perwakilan strategis Indonesia di luar negeri.

Dengan pertimbangan tersebut, berikut ini misi BPP Bahasa.

- 1) **Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.**
- 2) **Mewujudkan praktek-praktek pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital.**
- 3) **Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju.**

- 4) **Mewujudkan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat.**
- 5) **Mewujudkan layanan profesional kebahasaan.**

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan misi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif.

### C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan strategis lembaga, yaitu

1. peningkatan kualitas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra
2. Peningkatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan tujuan strategis pertama, dicapai melalui indikator (1) Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia; dan (2) Jumlah penutur muda bahasa daerah. Sementara itu, keberhasilan tujuan strategis kedua, dicapai melalui indikator Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB. Tujuan, indikator dan target pencapaian sampai dengan tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

No	Tujuan dan Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pengembangan, Pelindungan, dan Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>						
1.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	Skor	510	515	520	525	530
1.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	Orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
<b>2</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel</b>						
2.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	B	BB	BB	BB	BB

### D. Tata Nilai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut mendorong berkembangnya semangat untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga. Di antara nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Berintegritas

Berintegritas berarti memiliki keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indikator positifnya adalah konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran; jujur dalam segala tindakan; menghindari benturan kepentingan; berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Kreatif dan inovatif

Kreatif dan inovatif berarti memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada dan/atau yang sudah dikenal sebelumnya. Indikator positifnya adalah memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru; selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien.

#### c. Berinisiatif

Memiliki inisiatif berarti bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Indikator positifnya adalah responsif; bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi; memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah.

#### d. Pembelajar

Pribadi pembelajar selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Indikator positifnya adalah berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman; mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kesalahan; berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja.

#### e. Menjunjung Meritokrasi

Menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang berkompeten. Indikator positifnya adalah berkompetisi secara profesional; memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai; memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja; tidak sewenang-wenang; tidak mementingkan diri sendiri.

f. Terlibat Aktif

Terlibat aktif berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positifnya adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung lembaga; memberikan dukungan kepada rekan kerja.

g. Tanpa Pamrih

Tanpa pamrih berarti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Indikator positifnya adalah penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan; rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya; menunjukkan senyum, sapa, sopan, dan santun (4S).

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Visi Presiden tahun 2020—2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”**

Visi tersebut dijalankan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

### 3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud

Terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut.

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	- Meningkatkan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;</li> <li>2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;</li> <li>3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;</li> <li>4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;</li> <li>5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan</li> </ol>
		- Meningkatkan produktivitas dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan</li> <li>2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.</li> </ol>

2.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;</li> <li>2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;</li> <li>3. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.</li> </ol>
		- Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotongroyong, dan kerja sama antarwarga;</li> <li>2. pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;</li> <li>3. perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;</li> <li>4. pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia dan</li> <li>5. pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</li> </ol>
		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan budaya literasi;</li> <li>2. pengembangan pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan</li> <li>3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi</li> </ol>

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung pencapaian sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dunia usaha/dunia industri (DU/DI), dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar berikut.



Sumber: Renstra Kemdikbud 2020—2014

Gambar tersebut menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui

- (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020—2024 adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

### **3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi berikut ini.

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif.
2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan.

3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai ekonomi bahasa dan sastra.
4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud pembinaan bahasa dan sastra.

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait dengan Kemendikbud, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat berdiri pada dua bidang, yaitu: bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang pendidikan, arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri melalui berbagai aktivitas.

Pada bidang kebudayaan, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan
1.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA
2.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA
3.	Peraturan tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar program BIPA	Diperlukannya regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar BIPA sebagai upaya penjaminan mutu pengajaran BIPA.
4.	Peraturan tentang unit pelayanan pembelajaran terpadu Sasana Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	Peningkatan mutu layanan pembelajaran secara integral kepada mitra kepentingan
5.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Umum	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks umum (buku referensi, jurnal ilmiah, teks jurnalistik, dll)
6.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra
7.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Konferensi	Penjaminan mutu juru bahasa konferensi
8.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Kemasyarakatan	Penjaminan mutu juru bahasa kemasyarakatan, termasuk juru bahasa hukum (pengadilan dan kepolisian)
9.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Isyarat Dengar	Penjaminan mutu juru bahasa isyarat dengar (juru bahasa dapat mendengar)
10.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Isyarat Tuli	Penjaminan mutu juru bahasa isyarat yang tuli
11.	Peraturan tentang pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia	Pentingnya peraturan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang selama ini belum tersedia
12.	Peraturan tentang pedoman umum pembentukan istilah	Perlunya kaidah yang baku dalam pembentukan istilah
13.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya
14.	Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa
15.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan EYD, PUI, dan pedoman lainnya
17.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penambahan tarif nol dalam PNBP UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran pelajar

18.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
19.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia
20.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Ahli Bahasa	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Ahli Bahasa yang bisa digunakan dalam persidangan, penyusunan Undang-undang dan membina penggunaan bahasa Indonesia melalui penyuluhan dan penyuntingan, serta kebutuhan ahli bahasa di kepolisian
21.	Peraturan tentang Standar Laboratorium Kebahasaan	Pentingnya aturan mengenai standar Laboratorium Kebahasaan di seluruh Indonesia
22.	Peraturan tentang Pengembangan dan Pelindungan Sastra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi hak cipta Paten sastra.</li> <li>2. Perluanya Kebijakan nasional pengembangan dan pelindungan sastra</li> <li>3. Menjadikan sastra tuan di negeri sendiri, menangkal serbuan sastra asing ke dalam negeri.</li> <li>4. Meningkatkan fungsi dan peran sastra pada masyarakat secara nasional dan internasional</li> <li>5. Perlunya pengaturan pemerdayaan khazanah sastra, pengembangan laras sastra, pemantapan dan pembakuan sistem sastra, penerjemahan, penyaduran, pengadaptasian, pengalihwahaan, pengutipan, dan pengambilan sebagai bahan pembelajaran sastra.</li> </ol>

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

#### 3.4.1 Struktur Organisasi

Kelembagaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat diilustrasikan dalam bagan berikut.



Untuk memperjelas bagan organisasi, berikut ini tabel penanggung jawab program dan kegiatan beserta kode programnya.

Kode Program	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Direktur Jenderal Kebudayaan dan
2020	Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2021	Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2022	Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	UPT

### 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

No	Nama UPT	Pejabat Struktural				Jabatan Fungsional		Tingkat Pendidikan							Pangkat/Golongan			
		Eselon				tertentu	Umum	S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SMP	SD	IV	III	II	Jml
		III/a	III/b	IV/a	IV/b													
1.	Sekretariat Badan	1		1		86	13		11	57	12	20		1	5	80	16	101
2.	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra			1		91	56	4	49	91	2	3			21	125	2	148
3.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	1		1		47	27	2	22	43	5	4			12	59	5	76
4.	Balai Bahasa Jawa Timur	1		1		20	21	-	13	18	3	9	-	-	3	35	4	42
5.	Balai Bahasa Bali	1		1		13	27	-	14	12	-	15	-	1	10	25	7	42
6.	Balai Bahasa Aceh	1		1	1	4	28	-	5	23	3	4	-	-	3	29	3	35
7.	Balai Bahasa Sumatera Utara	1		1	1	8	26	2	14	15	-	5	-	-	2	32	2	36
8.	Balai Bahasa Riau	1		1	1	20	15	-	13	18	2	3	-	-	2	31	4	37
9.	Balai Bahasa Sumatera Barat	1		1	1	15	18	1	7	25	-	2	-	-	1	30	4	35
10.	Balai Bahasa Sumatera Selatan	1		1	1	17	19	-	7	23	-	6	-	-	2	29	7	38
11.	Balai Bahasa Jawa Barat	1		1	1	26	22	-	16	29	1	4	-	-	7	41	2	50
12.	Balai Bahasa Jawa Tengah	1		1	1	19	31	-	20	20	2	10	-	-	6	41	5	52
13.	Balai Bahasa D.I Yogyakarta	1		1	1	16	31	2	15	21	1	10	-	-	10	34	5	49
14.	Balai Bahasa Kalimantan Barat	1		1	1	13	19	-	5	19	10	-	-	-	2	27	5	34
15.	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	1		1	1	7	22	-	5	18	3	4	-	-	2	25	3	30
16.	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	1		1	1	20	17	-	10	24	1	4	-	-	2	33	4	39
17.	Balai Bahasa Sulawesi Utara	1		1	1	14	15	-	9	15	-	7	-	-	1	17	6	24
18.	Balai Bahasa Sulawesi Tengah	1		1	1	8	14	1	5	11	2	4	-	-	2	18	3	23
19.	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	1		1	1	29	22	1	20	23	2	6	-	1	15	34	4	53
20.	Balai Bahasa Papua	1		1	1	8	14	-	5	15	2	2	-	-	1	21	2	24

No	Nama UPT	Pejabat Struktural				Jabatan Fungsional		Tingkat Pendidikan								Pangkat/Golongan			
		Eselon				tertentu	Umum	S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SMP	SD	IV	III	II	Jml	
		III/a	III/b	IV/a	IV/b														
21.	Kantor Bahasa Jambi			1		14	24	-	11	24	-	5	-	1	35	4	40		
22.	Kantor Bahasa Bengkulu		1			5	14	-	4	16	-	-	-	-	20	-	20		
23.	Kantor Bahasa Kepulauan Riau		1			-	11	-	1	16	-	-	-	-	17	-	17		
24.	Kantor Bahasa Kep. Bangka Belitung		1			1	10	-	1	11	-	-	-	1	11	-	12		
25.	Kantor Bahasa Lampung		1			13	22	-	10	22	1	3	-	-	33	3	36		
26.	Kantor Bahasa Banten		1			3	17	-	1	19	1	-	-	-	21	-	21		
27.	Kantor Bahasa Kalimantan Timur		1			8	14	-	4	18	-	1	-	1	21	1	23		
28.	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat		1			13	23	-	6	26	3	2	-	1	34	2	37		
29.	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur		1			2	11	-	-	14	-	-	-	-	14	-	14		
30.	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara		1			9	18	-	6	25	1	1	-	3	29	1	33		
31.	Kantor Bahasa Gorontalo		1			4	13	1	1	10	-	-	-	2	16	-	18		
32.	Kantor Bahasa Maluku		1			4	18	1	-	22	-	-	-	-	23	-	23		
33.	Kantor Bahasa Maluku Utara		1			4	13	1	-	17	-	-	-	1	17	-	18		
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>561</b>	<b>665</b>	<b>16</b>	<b>310</b>	<b>760</b>	<b>57</b>	<b>134</b>	<b>2</b>	<b>119</b>	<b>1057</b>	<b>104</b>	<b>1280</b>		

### 3.4.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
  - a. layanan peserta didik;
  - b. layanan satuan pendidikan;
  - c. layanan substansi pendidikan;
  - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
  - e. layanan kebudayaan;
  - f. layanan kebahasaan; dan
  - g. layanan PAUD dan pendidikan masyarakat.

Untuk mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berdampak langsung kepada masyarakat adalah:

## **1. Gerakan Literasi Nasional**

Dalam rangka mendukung literasi, Badan Pengembangan dan Pembinaan sebagai koordinator Gerakan Literasi Nasional merencanakan kegiatan antara lain penyediaan buku literasi dan penyusunan pedoman cerita anak. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga merencanakan melakukan pembinaan komunitas literasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan literasi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara ASEAN. Pada tahun 2019, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melaksanakan pencetakan dan pengiriman 2.402.320 eksemplar buku dari 60 judul bahan bacaan literasi ke 2.258.560 sekolah di berbagai jenjang, 658 Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta 40 perpustakaan yang berada di wilayah 3T yang tersebar di 27 provinsi. BPP Bahasa akan melanjutkan untuk menyediakan bahan literasi melalui pencetakan bahan yang sudah lolos penilaian oleh Pusat Perbukuan, melakukan distribusi buku bacaan literasi, serta menerjemahan judul buku literasi kelas dunia.

## **2. Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra**

Pada 2020 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merencanakan melakukan kegiatan generasi muda terbina penggunaan Bahasa dan Sastra dengan target sebanyak 23.710. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar generasi muda Indonesia lebih bangga dan lebih mengutamakan bahasa Indonesia dari pada bahasa asing. Selain itu generasi muda Indonesia juga harus dapat melestarikan bahasadaerah dan menguasai bahasa asing agar dapat memasyarakatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional.

## **3. Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)**

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Tujuan pengembangan program BIPA dapat ditinjau dari dua perspektif. Dari aspek pedagogi, program BIPA bertujuan meningkatkan dan menjamin mutu hasil dan proses pembelajaran BIPA dalam rangka meningkatkan jumlah penutur asing yang mampu berbahasa Indonesia. Sementara itu, dari perspektif multidemensi (ekstrapengajaran), program BIPA bertujuan (1) menunjukkan jati diri (identitas) bangsa Indonesia di dunia internasional dan menyebarkan nilai keindonesiaan untuk perdamaian dunia, serta (2) meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam kerja sama dan persaingan antarbangsa untuk peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia. Selain itu, BPP Bahasa akan meningkatkan pemberdayaan diaspora, alumni Darmasiswa, dan mitra guru BIPA di negara akreditasi. Adapun,

sasaran program BIPA untuk tahun anggaran 2020—2024 melalui penugasan 220 pengajar BIPA ke luar negeri adalah bertambahnya jumlah pemelajar dan negara sasaran baru. Negara sasaran baru diidentifikasi dari berbagai kawasan berikut.

### 1) Kawasan ASEAN

Program BIPA telah dilaksanakan di seluruh negara di kawasan ASEAN, kecuali Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjadi sasaran yang akan dicapai pada renstra 2020—2024. Sementara itu, penugasan pengajar ke kawasan ASEAN tetap akan dilaksanakan sebagai upaya penguatan akses guna menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

### 2) Kawasan Aspasaf

Pengiriman guru BIPA ke Lembaga-lembaga di Arab Saudi, Qatar, Korea Selatan, Selandia Baru, Afrika Selatan, negara-negara di Afrika bagian selatan, dan negara-negara di Pasifik.

### 3) Kawasan Amerop

Pengiriman guru BIPA ke Lembaga-lembaga di Spanyol, Swiss, Swedia, Rumania, Turki, Republik Ceko, Slovenia, Kanada, dan negara-negara di Amerika Selatan. Pengiriman pengajar ke kawasan ini diutamakan untuk negara yang strategis dalam dimensi ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain.

Setiap tahunnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan mengirimkan tenaga pengajar BIPA ke lembaga-lembaga baru di minimal satu negara baru. Sebagaimana identifikasi negara potensial di atas, prioritas tahun anggaran 2020—2024 akan merencanakan penugasan ke negara baru dengan sasaran wilayah berikut.

No.	Tahun Anggaran	Negara Sasaran Baru
1.	2020	Arab Saudi
2.	2021	Korea Selatan
3.	2022	Selandia Baru
4.	2023	Qatar
5.	2024	Turki

Rencana pengiriman tenaga pengajar BIPA ke negara-negara tersebut didasarkan atas pertimbangan minat terhadap bahasa Indonesia yang telah melalui kajian dan koordinasi bersama dengan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimensi lain yang dijadikan bahan pertimbangan adalah pengaruh negara-negara tersebut terhadap aspek kerja sama dan peningkatan akses Indonesia di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

#### **4. Pengayaan Kosakata/Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merencanakan penambahan jumlah kata dan makna sebanyak 2.300 leksem pada tahun 2020. Penambahan ini akan dilakukan dengan berbagai kegiatan terkait, seperti Inventarisasi Kosakata, Sidang Komisi Istilah, dan Korpus. Usulan kosakata dari masyarakat dan pengumpulan kosakata populer yang beredar di masyarakat juga akan melengkapi rencana kegiatan penambahan jumlah kosakata. Penambahan akan dilakukan melalui pemutakhiran KBBI yang dilakukan pada April dan Oktober. Pemutakhiran tersebut dilakukan pada KBBI Daring. Masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar dapat melihat rincian pemutakhiran di laman KBBI Daring.

#### **5. Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia**

Target peserta yang menjadi sasaran pengujian 2020 untuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah 3.000 peserta yang terdiri atas 600 peserta dari kalangan guru, serta 600 peserta dari kalangan ASN Kemenaker (Perwakilan Asosiasi Profesi), Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dan Pusat Prestasi Nasional, ESDM, BAN-SM dan audiensi ke STIA LAN. Peserta ini digolongkan sebagai peserta dalam kegiatan Sosialisasi dan Tes UKBI. Selain itu, sasaran pengujian lainnya adalah peserta berbayar yang terdiri atas 1000 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa asing, 400 peserta dari kalangan pengajar asing Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) serta ekspatriat di K/L lain maupun perusahaan asing, dan 400 orang dari kalangan penerjemah, pengajar SILN, pengajar BIPA, dan karyawan swasta.

BPP Bahasa akan melaksanakan kerja sama dengan Ditjen GTK untuk menjadikan UKBI sebagai salah satu syarat dalam proses pengujian kompetensi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, BPP Bahasa akan kesepakatan dengan Pusdiklat Kemendikbud agar UKBI menjadi salah satu materi yang diujikan kepada para peserta Diklat di kalangan Kemendikbud (Pusdiklat Pegawai Kemendikbud).

#### **6. Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina**

Untuk menjenamakan bahasa Indonesia ke dunia internasional secara umum dan Negara Indonesia secara khusus, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan terus menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Pada 2020 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merencanakan menertibkan ruang publik ke 2.249 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pelaksanaan di Jakarta akan dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sedangkan pelaksanaan di daerah akan dilakukan oleh Balai Bahasa maupun Kantor Bahasa.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbud menetapkan satu sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari dua program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut.

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>						
IKSS 4.1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,5	57,3	59,1	60,9	62,7

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian program setiap sasaran program diukur dengan menggunakan lima Indikator Kinerja program sebagai berikut.

KODE	SASARAN DAN INDIKATOR	SATUAN	ANGKA DASAR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>SP 1</b>	<b>Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia</b>							
IKP 1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Persen	42	42	44	46	48	50
IKP 1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Persen	16	26	35	45	55	65
<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya budaya literasi</b>							
IKP 2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	55,03	58,2	61,4	64,6	67,8	71,04
<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah</b>							
IKP 3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59

<b>SP 4 Meningkatkan Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional</b>								
IKP 4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	29	30	31	32	33	34
IKP 4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	Orang	70.865	75.865	80.865	85.865	90.865	95.865
<b>SP 5 Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas</b>								
IKP 5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB
IKP 5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	2	5	5	5	5	5
IKP 5.3	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	90	91	92	93	94	95

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan lima indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Kode	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/ Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>2021</b>	<b>Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>						
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</b>						
IKK	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Baterai	22	27	32	36	40
IKK	Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	Naskah	18	25	32	39	46
IKK	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan	Naskah	89	96	103	110	117
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	43	32	32	32	32
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia</b>						
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	130.030	147.522	165.014	182.506	200.000
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Partisipan Aktif dalam Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan</b>						
IKK	Jumlah Lembaga Terfasilitasi secara Kebahasaan	Lembaga	323	435	547	659	771
IKK	Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	993	1.213	1.433	1.635	1.873
IKK	Jumlah Bahan Pengayaan Laboratorium Kebahasaan	Bahan	50	75	100	125	150

<b>2022</b>	<b>Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>						
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>						
IKK	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	3.589	3.977	4.365	4.752	5.140
<b>SK</b>	<b>Tersedianya Buku Pengayaan untuk Mendukung Literasi Membaca</b>						
IKK	Jumlah Buku Bermutu yang Diterjemahkan	Judul	100	125	150	175	200
IKK	Jumlah Buku Pengayaan Literasi	Judul	711	786	861	961	1061
IKK	Jumlah Buku Pengayaan yang Digunakan dalam Pendidikan untuk Meningkatkan Literasi Membaca	Buku	120	180	240	300	360
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina</b>						
IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	73.050	80.355	88.390	97.229	106.952
<b>5289</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah</b>						
<b>SK</b>	<b>Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah</b>						
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	17.000	25.000	33.000	41.000	49.000
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	17.000	25.000	33.000	41.000	49.000
IKK	Jumlah Produk Kesastraan Berkembang	Sastra	6	10	14	18	22
<b>2020</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>						
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>						
IKK	Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
IKK	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	Satker	5	2	2	2	2
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	91	92	93	94	95

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang—undangan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Perincian pendanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat dalam tabel berikut.

## Periode 2020

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	2020
<b>023.13.10</b>	<b>Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>	<b>416,1</b>
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	150,8
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	44,6
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	28,5
5288	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	6,5
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	185,5

## Periode 2021—2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN			
		2021	2022	2023	2024
<b>023.WA</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>294,9</b>	<b>320</b>	<b>352</b>	<b>387</b>
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	294,9	320	352	387
<b>023.DH</b>	<b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>	<b>196,4</b>	<b>216</b>	<b>237,2</b>	<b>260,7</b>
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	78,8	86,7	95,3	104,7
2021	Pembinaan Bahasa dan Sastra	53	58,1	63,6	70
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	64,6	71,2	78,3	86
<b>Total</b>		<b>491,3</b>	<b>536</b>	<b>589,2</b>	<b>647,7</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini disusun dalam rangka berperan serta mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang termaktub dalam RPJMN. Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024, BPP Bahasa dapat berdiri pada dua bidang, yaitu: bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang pendidikan, arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Selain itu, BPP Bahasa juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri melalui berbagai aktivitas.

Pada bidang kebudayaan, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan melakukan prioritas kita dalam 4 tahun ke depan adalah **1) Literasi; 2) Kamus dan Istilah; 3) UKBI; 4) BIPA; dan 5) Pelindungan, pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra.**

Rencana Strategis ini menjabarkan visi dan misi Presiden beserta sasaran nasional dalam rangka berperan serta mencapai sasaran program dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra BPP Bahasa juga menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra BPP Bahasa ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa yang hendak dicapai pada periode 2020—2024. Selain itu Renstra BPP Bahasa, dapat

dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan yang juga berperan serta dalam penanganan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, serta masyarakat.

Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam program dan kegiatan penanganan kebahasaan dan kesastraan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil penanganan kebahasaan dan kesastraan dan pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.



**SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA 2020—2024**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

**A. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**

<b>SS</b>	: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
<b>IKSS</b>	: Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
Rata-rata skor kemahiran berbahasa merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Indikator ini merupakan nilai pertengahan (rerata) yang menunjukkan kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia, meliputi kemampuan menyimak, kemampuan membaca, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis, serta kemampuan tentang kaidah bahasa Indonesia.	<p>Skor kemahiran berbahasa Indonesia diukur dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang telah dikembangkan oleh Badan Bahasa sejak tahun 2003. Skor ini terdiri atas tujuh pemeringkatan, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istimewa (725—800)</li> <li>2. Sangat unggul (641—724)</li> <li>3. Unggul (578—640)</li> <li>4. Madya (482—577)</li> <li>5. Semenjana (405—481)</li> <li>6. Marginal (326—404)</li> <li>7. Terbatas (251—325).</li> </ol> <p>Angka dasar sebesar 505 diperoleh dari rerata skor peserta UKBI berbayar (PNBP) pada tahun 2019. Sebanyak 9340 peserta yang meminta layanan UKBI pada tahun tersebut dengan rerata skor 505. Target kenaikan tiap tahun sebesar 5 poin ditentukan berdasarkan rerata kenaikan skor selama 3 tahun terakhir.</p> <p>Satuan: Skor Tipe penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Peserta UKBI dari seluruh Indonesia yang terdata dalam Sistem Pengelolaan Data dan Pelaporan Hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia ( <a href="http://118.98.223.79/dataukbi/index.php">http://118.98.223.79/dataukbi/index.php</a> )

<b>SS</b>	: Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	
<b>IKSS</b>	: Jumlah penutur muda bahasa daerah	
<b>Definisi:</b>	Jumlah penutur muda bahasa daerah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang bahasanya telah direvitalisasi, baik berbasis komunitas maupun berbasis sekolah.	<b>Metode Penghitungan:</b>
		<p>1. Jumlah penutur muda bahasa daerah dihitung berdasarkan jumlah keikutsertaan generasi muda usia 10--19 tahun yang terlibat dalam program perlindungan bahasa dalam kegiatan revitalisasi bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Jumlah penutur-muda bahasa merupakan hasil perkalian dari target jumlah bahasa yang akan dicapai tiap tahun (lini dasar 45 bahasa) dengan jumlah rata-rata penutur muda yang terlibat dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah, baik berbasis komunitas/masyarakat maupun berbasis sekolah/klasikal. Jumlah rata-rata keikutsertaan 200 orang.</p> <p>Satuan: Orang Tipe penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	<b>Sumber Data:</b>
		<p>1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: <a href="http://petabahasa.kemdikbud.go.id">petabahasa.kemdikbud.go.id</a>, <a href="http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id">regbahasasastra.kemdikbud.go.id</a>, <a href="http://labbineka.kemdikbud.go.id">labbineka.kemdikbud.go.id</a>).</p> <p>2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: <a href="http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id">regbahasasastra.kemdikbud.go.id</a>).</p>

## B. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

<b>SP</b>	: Meningkatkan kemahiran penutur bahasa Indonesia	
<b>IKP</b>	: Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji	
<b>Definisi:</b>	<p>Penutur bahasa Indonesia mahir teruji merupakan penutur bahasa Indonesia yang mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) dan berkategori mahir (memiliki peringkat Unggul, Sangat Unggul, Istimewa).</p>	<p><b>Metode Penghitungan:</b></p> <p>Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji merupakan perbandingan peserta UKBI mahir (Unggul, Sangat Unggul, Istimewa) dengan seluruh peserta UKBI.</p> <p>Angka dasar sebesar 42% merupakan perbandingan peserta berkategori mahir (6.183 peserta) dan total peserta UKBI (14.589 peserta) pada tahun 2019.</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<p>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</p>	<p><b>Sumber Data:</b></p> <p>Peserta UKBI dari seluruh Indonesia yang terdata dalam Sistem Pengelolaan Data dan Pelaporan Hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://118.98.223.79/dataukbi/index.php">http://118.98.223.79/dataukbi/index.php</a></li> <li>2. <a href="http://dapobas.kemdikbud.go.id">dapobas.kemdikbud.go.id</a></li> </ol>

<b>SP</b>	: Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia
<b>IKP</b>	: Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
Wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan wilayah yang lanskap ruang publiknya ditandai dengan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, bukan bahasa asing atau bahasa daerah.	<p>Dalam peta keterkendalian penggunaan bahasa, wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia merupakan wilayah berkategori “Terkendali A” dan “Terkendali B”</p> <p>Berikut ini kategori keterkendalian wilayah penggunaan bahasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkendali A (skor 2.601—3.000) Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak diteukan bahasa asing yang melemahkan; hamper sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik.</li> <li>2. Terkendali B (Skor 2. 201—2.600) Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing yang melemahkan; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik.</li> <li>3. Terkendali C (skor 1.800—2.200) Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik masih didominasi bahasa asing yang melemahkan; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.</li> <li>4. Terkendali D (Skor 1.400—1.799) Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik sangat didominasi bahasa asing yang melemahkan; sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang kurang baik.</li> <li>5. Belum Terkendali (Skor <math>\leq</math> 1.399) Kategori ini menunjukkan wilayah yang nilainya di bawah batas nilai keterkendalian.</li> <li>6. Tidak Teridentifikasi</li> </ol>

	<p>Data tidak bisa diolah karena tidak sesuai dengan ketentuan petunjuk teknik pengutamaan bahasa negara di ruang publik.</p> <p>Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik adalah perbandingan antara kabupaten/kota yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik dengan jumlah total kabupaten/kota yang ada di Indonesia.</p> <p>Angka dasar 16% merupakan perbandingan antara kabupaten/kota berkategori A dan B (sebanyak 84 kabupaten/kota) dibandingkan jumlah total kabupaten/kota yang ada di Indonesia (sebanyak 514 kabupaten/kota). Data tersebut berasal dari data tahun 2018.</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<p><b>Unit Pelaksana:</b></p>	<p><b>Sumber Data:</b></p>
<p>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</p>	<p>Data Pokok Kebahasaan (<a href="http://www.dapobas.kemdikbud.go.id">www.dapobas.kemdikbud.go.id</a>)</p>

<b>SP</b>	: Meningkatnya Budaya Literasi
<b>IKP</b>	: Nilai Dimensi Budaya Literasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
Dimensi Budaya Literasi merupakan salah satu dari tujuh dimensi yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Dimensi ini memuat aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat.	<p>Nilai dimensi ini diperoleh dari tiga indikator, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik</li> <li>2. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet</li> <li>3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat</li> </ol> <p>Angka dasar sebesar 55,03 diperoleh dari Nilai Dimensi Literasi IPK tahun 2018. Nilai 71,04 merupakan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020—2024. Berdasarkan rentang nilai tersebut, target tiap tahun ditentukan naik sebesar 2,67.</p> <p>Satuan: Indeks Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (ipk.kemdikbud.go.id)</li> <li>2. Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020--2024</li> </ol>

<b>SP</b>	: Meningkatnya daya hidup bahasa daerah
<b>IKP</b>	: Indeks daya hidup bahasa daerah
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
<p>1. Indeks vitalitas atau daya hidup suatu bahasa daerah merujuk pada indeks intensitas penggunaan dan eksistensi bahasa daerah itu sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks sosial untuk tujuan tertentu.</p> <p>2. Salah satu subindikator bahasa daerah dapat dikatakan memiliki vitalitas yang tinggi apabila penutur muda bahasa daerah tersebut berjumlah banyak dan variasi bahasa tersebut digunakan secara luas. Karakteristik ini juga merupakan salah satu ciri bahasa yang akan terus digunakan dan diturunkan dari generasi ke generasi.</p>	<p>1. Daya hidup atau vitalitas bahasa dapat diketahui dari dua hal yang dihubungkan, yaitu hubungan semua indeks indikator dengan karakteristik responden sebagai penutur bahasa asli. Indeks indikator meliputi (1) penutur, (2) kontak bahasa, (3) bilingualisme, (4) posisi dominan masyarakat penutur, (5) ranah penggunaan bahasa, (6) sikap bahasa, (7) regulasi, (8) pembelajaran, (9) dokumentasi, dan (10) tantangan baru.</p> <p>2. Rasio penutur digolongkan dalam lima rentang nilai dari populasinya. Tiap rasio itu dinisbahkan dengan indeks vitalitas bahasa dan sastra yang ditetapkan oleh Badan Bahasa. Misalnya, rasio penutur &lt;21% dari populasi dapat dinisbahkan dengan indeks 0,00—0,20 yang berarti tingkat vitalitas bahasa dan sastra tersebut berstatus kritis, dst. Tingkat vitalitas atau daya hidup dimulai dari aman (indeks 0,81—1,00), rentan (0,61—0,80), mengalami kemunduran (0,41—0,60), terancam punah (0,21—0,40), kritis (0,00—0,20), hingga punah (indeks 0,00).</p> <p>3. Karena sasaran program ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, perlindungan terhadap bahasa dan sastra diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.</p> <p>4. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada rata-rata indeks bahasa dan sastra yang mengalami kemunduran dalam rentang 0,41 hingga 0,60, yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59.</p> <p>Satuan: Indeks Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Hasil kajian vitalitas bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: <a href="http://petabahasa.kemdikbud.go.id">petabahasa.kemdikbud.go.id</a> dan <a href="http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id">regbahasasastra.kemdikbud.go.id</a> ).

<b>SP</b>	: Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	
<b>IKP</b>	: Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	
<b>Definisi:</b>	Jumlah negara yang melalui lembaga atau komunitas terkait di negaranya menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia bagi warga negaranya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.	<b>Metode Penghitungan:</b>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Target volume keluaran setiap tahun sebanyak satu negara dihitung dari jumlah minimal negara strategis baru yang mengajarkan bahasa Indonesia, baik di jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui lembaga penyelenggara program BIPA, yaitu perguruan tinggi, sekolah, lembaga kursus/pelatihan, Perwakilan RI, pusat budaya Indonesia, dan/atau komunitas belajar.  Satuan: Negara Tipe Penghitungan: Kumulatif
		<b>Sumber Data:</b>
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		(1) BIPA Daring: <a href="http://bipa.kemdikbud.go.id">bipa.kemdikbud.go.id</a> ; (2) laporan kegiatan Pengiriman dan Penugasan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri; (3) LAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta LAKIP Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Tahun 2019.

<b>SP</b>	: Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	
<b>IKP</b>	: Jumlah pemelajar BIPA	
<b>Definisi:</b>	Jumlah warga negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal di negaranya.	<b>Metode Penghitungan:</b>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Target setiap tahun sebanyak 5.000 orang pemelajar BIPA dihitung dari jumlah pemelajar dari kawasan Asia Tenggara, Amerika dan Eropa, serta Asia, Pasifik, dan Afrika yang dilayani oleh pengajar BIPA yang ditugasi Badan Bahasa dengan target setiap penugasan pengajar melayani minimal 23 orang pemelajar BIPA.  Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif
		<b>Sumber Data:</b>
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		(1) BIPA Daring: <a href="http://bipa.kemdikbud.go.id">bipa.kemdikbud.go.id</a> ; (2) laporan kegiatan Pengiriman dan Penugasan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri; (3) LAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta LAKIP Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Tahun 2019.

<b>SP</b>	: Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas																									
<b>IKP</b>	: Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB																									
<b>Definisi:</b>	<p>Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB merupakan indikator sistem akuntabilitas dan kinerja tahunan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menunjukkan kualitas yang sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem kinerja yang andal.</p>	<p><b>Metode Penghitungan:</b></p> <p>Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (20%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Kinerja (10%) + Capaian Kinerja (20%)</p> <p>Nilai perolehan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berikut ini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;90—100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;80—90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;70—80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;60—70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;50—60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>&gt;30—50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0—30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90—100	AA	Sangat Memuaskan	>80—90	A	Memuaskan	>70—80	BB	Sangat Baik	>60—70	B	Baik	>50—60	CC	Cukup (Memadai)	>30—50	C	Kurang	0—30	D	Sangat Kurang
Nilai		Predikat	Interpretasi																							
>90—100	AA	Sangat Memuaskan																								
>80—90	A	Memuaskan																								
>70—80	BB	Sangat Baik																								
>60—70	B	Baik																								
>50—60	CC	Cukup (Memadai)																								
>30—50	C	Kurang																								
0—30	D	Sangat Kurang																								
<b>Unit Pelaksana:</b>	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	<p><b>Sumber Data:</b></p> <p>Laporan SAKIP Badan Bahasa tahun 2019</p>																								

<b>SP</b>	: Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas	
<b>IKP</b>	: Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK /WBBM	
<b>Definisi:</b>	<p>Jumlah satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa yang memenuhi standar wilayah bebas dari korupsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB sebagai indikator bahwa satuan kerja tersebut melaksanakan manajemen perubahan, penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.</p>	<p><b>Metode Penghitungan:</b></p> <p>Target 2 satker yang mendapatkan ZI-WBK berdasarkan jumlah satker Badan Bahasa yang dibina menuju WBK. Ditargetkan minimal setengah dari satker yang diajukan akan mendapatkan ZI-WBK, terutama karena satker-satker tersebut telah dibina secara intensif perihal ZI-WBK.</p> <p>Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

## B. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

<b>SK</b>	: Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	
<b>IKK</b>	: Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	
<b>Definisi:</b>		<b>Metode Penghitungan:</b>
Instrumen UKBI ialah instrumen standar untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati msupun penutur asing.		Angka dasar 18 instrumen berasal dari jumlah instrumen yang telah disusun dan divalidasi yang terdapat dalam bank soal sampai tahun 2019. Setiap tahun disusun 4 hingga 5 instrumen berdasarkan ketersediaan sumber daya (waktu, anggaran, dan SDM).  Target yang tertera di Renstra Kemendikbud sebanyak 22  Satuan: baterai Tipe Penghitungan: kumulatif
<b>Unit Pelaksana:</b>		<b>Sumber Data:</b>
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		Lakip Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra Tahun 2019

<b>SK</b>	: Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	
<b>IKK</b>	: Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	
<b>Definisi:</b>		<b>Metode Penghitungan:</b>
Produk kebahasaan dan kesastraan, berupa kaidah atau prosedur, yang telah dibakukan dan/atau dikodifikasi untuk dijadikan landasan praktis dalam pengembangan, pembinaan, atau pelindungan bahasa dan sastra.		Jumlah acuan kebahasaan yang telah disusun, baik tercetak dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk digital.  Angka dasar 15 naskah berdasarkan jumlah acuan yang dimiliki Badan Bahasa sampai tahun 2019, antara lain, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilan, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dll.  Satuan: naskah Tipe Penghitungan: kumulatif
<b>Unit Pelaksana:</b>		<b>Sumber Data:</b>
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		1. Statistik Kebahasaan, Kesastraan, dan Perbukuan Tahun 2020 terbitan Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud  2. LAKIP Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra Tahun 2019

<b>SK</b>	: Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	
<b>IKK</b>	: Jumlah bahan ajar kebahasaan	
<b>Definisi:</b>	Jumlah bahan yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing serta pembelajaran bahasa asing untuk tujuan strategis bagi warga negara Indonesia	<b>Metode Penghitungan:</b>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Angka dasar sebanyak 82 naskah merupakan jumlah bahan ajar kebahasaan yang dimiliki Badan Bahasa pada tahun 2019. Target tiap tahun sebanyak 7 bahan ajar yang terdiri atas 5 bahan ajar BIPA dan 2 bahan ajar bahasa asing strategis.  Satuan: Naskah Tipe Penghitungan: Kumulatif
	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	<b>Sumber Data:</b>
		(1) BIPA Daring: <a href="http://bipa.kemdikbud.go.id">bipa.kemdikbud.go.id</a> ; (2) laporan kegiatan Penyusunan Bahan Ajar BIPA dan Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Asing; (3) LAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta LAKIP Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Tahun 2019

<b>SK</b>	: Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	
<b>IKK</b>	: Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	
<b>Definisi:</b>	Hasil dari penelitian bahasa dan sastra yang dirangkum dan disarikan menjadi rekomendasi kepada pimpinan guna menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	<b>Metode Penghitungan:</b>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Angka dasar 4 dokumen diperoleh berdasarkan dokumen kebijakan yang dimiliki Badan Bahasa pada tahun 2019.  Pada tahun 2020, terdapat 43 dokumen kebijakan yang diperoleh dari UPT dan pusat. Dari pusat sebanyak 13 dokumen rekomendasi, sedangkan 30 dokumen diperoleh dari UPT. Target tahun 2021 s.d. 2024 sebanyak 32 dokumen dengan perincian UPT 30 dan Pusat 2 dokumen.  Satuan: Dokumen Tipe Penghitungan: Nonkumulatif
	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	<b>Sumber Data:</b>
		Lakip Badan Bahasa Tahun 2019

<b>SK</b>	: Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia
<b>IKK</b>	: Jumlah kosakata bahasa Indonesia
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
Jumlah kata beserta maknanya yang ada dan dipakai dalam komunikasi berbahasa Indonesia ragam formal maupun informal	<p>Penjumlahan entri KBBI, kamus bidang ilmu, dan entri dalam kompilasi kamus</p> <p>Angka dasar diperoleh dari jumlah kosakata pada akhir tahun 2019. Target tiap tahun sebanyak 17.492 kosakata diperoleh dari selisih target 2024 dan angka dasar lalu dibagi selama 5 tahun  Target = <math>(200.000 - 112.583) / 5</math></p> <p>Satuan: Kosakata  Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KBBI Daring (<a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/">https://kbbi.kemdikbud.go.id/</a>),</li> <li>2. Glosarium bidang ilmu (<a href="http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/">http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/</a>), dan</li> <li>3. Aplikasi kompilasi kamus (<a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus">https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus</a>)</li> </ol>

<b>SP</b>	: Meningkatkan jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan
<b>IKP</b>	: Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra baik internal maupun eksternal dan jumlah lembaga yang menjadi aset dan akses diplomasi kebahasaan di dalam dan luar negeri dalam bentuk lembaga penyelenggara program BIPA, lembaga pemerintah dan/atau swasta pemangku kepentingan terkait, organisasi/badan internasional, organisasi profesi, serta komunitas/kelompok masyarakat.	<p>Target volume keluaran setiap tahun sebanyak 112 lembaga, lembaga aset dan akses diplomasi kebahasaan dihitung dari jumlah lembaga penyelenggara program dan lembaga pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui jalur pendidikan serta dalam optimalisasi tugas dan fungsi fasilitasi kebahasaan.</p> <p>Perinciannya adalah 12 lembaga internal/eksternal, minimal 80 lembaga di dalam negeri (meliputi perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga kursus/pelatihan penyelenggara program BIPA serta afiliasi/asosiasi pengajar dan pegiat BIPA) dan 20 lembaga di luar negeri (meliputi perguruan tinggi, sekolah, lembaga kursus/pelatihan, Perwakilan RI, dan pusat budaya Indonesia penyelenggara program BIPA serta afiliasi/asosiasi pengajar dan pegiat BIPA).</p> <p>Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	(1) BIPA Daring: <a href="http://bipa.kemdikbud.go.id">bipa.kemdikbud.go.id</a> ; (2) laporan kegiatan Fasilitasi Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan; (3) laporan kegiatan fasilitasi Kebahasaan; (4) LAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta LAKIP Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Tahun 2019

<b>SP</b>	: Meningkatkan jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan
<b>IKP</b>	: Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
Jumlah WNI dan WNA yang memiliki kualifikasi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang ditugasi untuk melaksanakan pengajaran BIPA dan kegiatan diplomasi kebahasaan lainnya.	<p>Target sebanyak 220 penugasan setiap tahun dihitung dari jumlah penugasan pengajar BIPA untuk melaksanakan pengajaran BIPA dan kegiatan diplomasi kebahasaan lainnya ke lembaga dan negara sasaran. Penetapan target sebanyak 220 penugasan pengajar BIPA per tahun dihitung dari jumlah total 773 penugasan pada 2015--2019 (sebagai lini dasar) yang rerata per tahunnya sebanyak 155 penugasan (rata-rata 52 penugasan ke setiap kawasan, yaitu Asia Tenggara; Asia, Pasifik, dan Afrika; serta Amerika dan Eropa).</p> <p>Rerata tersebut ditambah minimal 40% (minimal 62 penugasan) penugasan yang difokuskan ke kawasan Asia Tenggara (sebagai bentuk tindak lanjut arahan Mendikbud pada 20 Februari 2020). Persentase 40% diperoleh dari rerata persentase jumlah pemelajar BIPA (sebagai dampak program ini) di kawasan Asia Tenggara selama 5 tahun terakhir. Dengan demikian, jumlah total target penugasan per tahun adalah 155 penugasan ditambah 62 penugasan ke kawasan Asia Tenggara, yaitu sebanyak 217 penugasan (dibulatkan menjadi 220 penugasan).</p> <p>Satuan: Penugasan Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	<p>(1) BIPA Daring: <a href="http://bipa.kemdikbud.go.id">bipa.kemdikbud.go.id</a>;  (2) laporan kegiatan Pengiriman dan Penugasan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri;  (3) LAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta LAKIP Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Tahun 2019</p>

<b>SP</b>	: Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan	
<b>IKP</b>	: Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	
<b>Definisi:</b>	Jumlah bahan yang dikembangkan untuk memperkaya laboratorium kebahasaan, baik laboratorium kebinekaan bahasa, laboratorium penerjemahan, laboratorium BIPA, dan laboratorium forensik kebahasaan. Pengembangan laboratorium ini merupakan salah satu strategi kebahasaan dalam rangka memeperkuat persatuan bangsa dan menginternasionalkan bahasa Indonesia.	<b>Metode Penghitungan:</b>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Angka dasar 50 bahan merupakan jumlah bahan pengayaan pada tahun 2019. Terdapat penambahan sebanyak 25 bahan pengayaan tiap tahun berdasarkan kebutuhan lima unit pelayanan edukasi (Sasana Strategi Diplomasi Kebahasaan).  Satuan: Bahan Tipe Penghitungan: Kumulatif
		<b>Sumber Data:</b>
	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Lakip Badan Bahasa Tahun 2019

<b>SP</b>	: Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik	
<b>IKP</b>	: Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	
<b>Definisi:</b>	Jumlah lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan bahasanya, terutama untuk papan nama lembaga, papan petunjuk, dan sebagainya.	<b>Metode Penghitungan:</b>
		Angka dasar sebanyak 1740 diperoleh dari lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi pada tahun 2019,  Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif
<b>Unit Pelaksana:</b>	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	<b>Sumber Data:</b>
		Lakip Badan Bahasa 2019

<b>SK</b>	: Meningkatkan jumlah penutur bahasa terbina	
<b>IKK</b>	: Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	
<b>Definisi:</b>	Jumlah tenaga ahli khusus dan calon tenaga ahli yang dibina mutu penggunaan bahasa dan sastranya melalui pembelajaran dan masyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.	<b>Metode Penghitungan:</b>
		Angka dasar sebanyak 66.409 orang diperoleh berdasarkan jumlah peserta yang dibina pada tahun 2019, antara lain melalui penyuluhan, pelatihan, dan sebagainya. Kenaikan tiap tahun berdasarkan target yang dirancang oleh tiap satker.  Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif
<b>Unit Pelaksana:</b>	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	<b>Sumber Data:</b>
		LAKIP Badan Bahasa Tahun 2019

<b>SK</b>	: Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca	
<b>IKK</b>	: Jumlah buku bermutu yang diterjemahkan	
<b>Definisi:</b>	Naskah/dokumen/buku bernilai strategis yang dibutuhkan demi meningkatkan kecerdasan dan budi pekerti, pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan, serta kepentingan hubungan baik dan diplomasi dengan negara lain. Bahasa sumber adalah bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah; bahasa sasaran: bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.	<b>Metode Penghitungan:</b>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Angka dasar sebanyak 113 judul diperoleh dari judul naskah yang diterjemahkan pada tahun 2019. Target sampai 2024 sebanyak 200 judul buku untuk mempercepat transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai arahan Mendikbud) sekaligus menduniakan karya adiluhung Indonesia.  Satuan: Judul Tipe Penghitungan: Kumulatif
	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	<b>Sumber Data:</b>
		Lakip Badan Bahasa 2019

<b>SK</b>	: Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca	
<b>IKK</b>	: Jumlah buku pengayaan literasi	
<b>Definisi:</b>	Banyaknya judul buku penunjang literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan Bahasa. Buku tersebut terdiri atas berbagai tema dan ditujukan bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan.	<b>Metode Penghitungan:</b>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Angka dasar 661 judul buku diperoleh dari jumlah judul buku penunjang literasi membaca yang dimiliki Badan Bahasa pada tahun 2019. Penyusunan buku tiap tahun berkisar 50--100 judul berdasarkan evaluasi terhadap topik dan sasaran buku.  Satuan: Judul Tipe Penghitungan: Kumulatif
	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	<b>Sumber Data:</b>
		Lakip Badan Bahasa 2019

<b>SK</b>	: Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca	
<b>IKK</b>	: Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca	
<b>Definisi:</b>	Banyaknya judul buku penunjang literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan Bahasa. Buku tersebut terdiri atas berbagai tema dan ditujukan bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan.	<b>Metode Penghitungan:</b>
<b>Unit Pelaksana:</b>		Angka dasar 60 judul buku diperoleh dari jumlah judul buku penunjang literasi membaca yang pada tahun 2019 dicetak dan didistribusikan ke wilayah 3T.  Satuan: Judul Tipe Penghitungan: Kumulatif
	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	<b>Sumber Data:</b>
		Lakip Badan Bahasa 2019

<b>SK</b>	: Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah
<b>IKK</b>	: Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
<p>1. Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi bahasa di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status bahasanya kritis dan terancam punah.</p> <p>2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, perlindungan terhadap bahasa diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.</p>	<p>1. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (&lt;20) dan yang terancam (&lt;40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41--0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59.</p> <p>2. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.</p> <p>Satuan: orang Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>
UPT (Balai/Kantor Bahasa)	<p>1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: <a href="http://petabahasa.kemdikbud.go.id">petabahasa.kemdikbud.go.id</a>, <a href="http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id">regbahasasastra.kemdikbud.go.id</a>, <a href="http://labbineka.kemdikbud.go.id">labbineka.kemdikbud.go.id</a>).</p> <p>2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: <a href="http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id">regbahasasastra.kemdikbud.go.id</a>).</p>

<b>SK</b>	: Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah
<b>IKK</b>	: Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>
<p>1. Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah.</p> <p>2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup sastra daerah, perlindungan terhadap sastra berbahasa daerah diprioritaskan pada sastra lisan yang berstatus kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.</p>	<p>1. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (&lt;20) dan yang terancam (&lt;40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41--0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59.</p> <p>2. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.</p> <p>Satuan: orang Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>
UPT (Balai/Kantor Bahasa)	<p>1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: <a href="http://petabahasa.kemdikbud.go.id">petabahasa.kemdikbud.go.id</a>, <a href="http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id">regbahasasastra.kemdikbud.go.id</a>, <a href="http://labbineka.kemdikbud.go.id">labbineka.kemdikbud.go.id</a>).</p> <p>2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: <a href="http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id">regbahasasastra.kemdikbud.go.id</a>).</p>

<b>SK</b>	: Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	
<b>IKK</b>	: Jumlah produk kesastraan terkembangkan	
<b>Definisi:</b>	<p>Produk sastra terkembangkan adalah produk dari hasil upaya untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi dan kedudukan sastra sebagai kekayaan budaya dan bagian dari sastra dunia melalui penelitian, peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia; kodifikasi sastra; penyusunan bahan ajar; penerjemahan; pengalihwahanaan; dan publikasi hasil pengembangan sastra.</p>	<b>Metode Penghitungan:</b>
		<p>jumlah penjumlahan hasil kritik sastra, alih wahana, entri/artikel kamus dan ensiklopedia sastra, serta acuan kesastraan.</p> <p>Satuan: orang Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana:</b>	UPT (Balai/Kantor Bahasa)	<b>Sumber Data:</b>
		Hasil kegiatan pengembangan sastra di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

<b>SK</b>	: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa																									
<b>IKK</b>	: Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB																									
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>																									
Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB berarti merupakan indikator sistem akuntabilitas dan kinerja tahunan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menunjukkan kualitas yang sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem kinerja yang andal.	<p>Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (20%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Kinerja (10%) + Capaian Kinerja (20%)</p> <p>Nilai perolehan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berikut ini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;90—100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;80—90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;70—80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;60—70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;50—60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>&gt;30—50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0—30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>		Nilai	Predikat	Interpretasi	>90—100	AA	Sangat Memuaskan	>80—90	A	Memuaskan	>70—80	BB	Sangat Baik	>60—70	B	Baik	>50—60	CC	Cukup (Memadai)	>30—50	C	Kurang	0—30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																								
>90—100	AA	Sangat Memuaskan																								
>80—90	A	Memuaskan																								
>70—80	BB	Sangat Baik																								
>60—70	B	Baik																								
>50—60	CC	Cukup (Memadai)																								
>30—50	C	Kurang																								
0—30	D	Sangat Kurang																								
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>																									
Sekretariat Badan	Dokumen SAKIP dari Biro Keuangan, Kemendikbud																									

<b>SK</b>	: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
<b>IKK</b>	: Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBMM	
<b>Definisi:</b>	<b>Metode Penghitungan:</b>	
Jumlah satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa yang memenuhi standar wilayah bebas dari korupsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB sebagai indikator bahwa satuan kerja tersebut melaksanakan manajemen perubahan, penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.	<p>Target 2 satker yang mendapatkan ZI-WBK berdasarkan jumlah satker Badan Bahasa yang dibina menuju WBK. Ditargetkan minimal setengah dari satker yang diajukan akan mendapatkan ZI-WBK, terutama karena satker-satker tersebut telah dibina secara intensif perihal ZI-WBK.</p> <p>Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	
<b>Unit Pelaksana:</b>	<b>Sumber Data:</b>	
Sekretariat Badan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMK 214/PMK.02/2017</li> <li>2. Aplikasi SMART DJA</li> </ol>	

<b>SK</b>	: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		
<b>IKK</b>	: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91		
<b>Definisi:</b>		<b>Metode Penghitungan:</b>	
Capaian kinerja berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi (target dan anggaran)		Pembandingan target dan anggaran dalam dokumen perencanaan dengan realisasi.	
		Satuan: Nilai	
		Tipe Penghitungan: Nonkumulatif	
<b>Unit Pelaksana:</b>		<b>Sumber Data:</b>	
Sekretariat Badan		1. PMK 214/PMK.02/2017	
		2. Aplikasi SMART DJA	

**Catatan:**

1. Matriks di atas disusun berdasarkan sasaran dan indikator yang termuat dalam lampiran Renstra Kemendikbud 2020—2024 (Permendikbud No. 22 Tahun 2020).
2. Sasaran dan indikator tersebut belum sesuai dengan rancangan sasaran dan indikator Badan Bahasa sehingga perlu segera disampaikan usulan perbaikan lampiran renstra.



**RENCANA  
STRATEGIS**  
**BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**  
**2020—2024**

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
Jalan Daksinapati Barat IV,  
Rawamangun, Jakarta Timur